



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF PADA INSTALASI KARANTINA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Sanksi Administratif pada Instalasi Karantina Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6411);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 408);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PADA INSTALASI KARANTINA IKAN.

KESATU : Menetapkan tata cara pengenaan sanksi administratif pada instalasi karantina ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Menetapkan bentuk dan format sanksi administratif instalasi karantina ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ttd.

RINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PADA INSTALASI
KARANTINA IKAN

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADIMINISTRATIF PADA
INSTALASI KARANTINA IKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan Instalasi Karantina Ikan (IKI) semakin penting dengan adanya perubahan sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Kemudahan-kemudahan pengaturan atau regulasi yang diberikan oleh Pemerintah baik untuk kegiatan ekspor ataupun impor akan memiliki konsekuensi yang kuat dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu (HPI) di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa IKI harus benar-benar mampu menjadi filter bagi penyebaran HPIK/HPI Tertentu maupun pengawasan dan/atau pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka.

Kondisi tersebut dapat dicapai hanya apabila ada kerja sama yang baik antara Pejabat karantina ikan dan Pelaku Usaha selaku Pengelola IKI. Kerja sama tersebut berupa komitmen dan kepatuhan untuk menjalankan pengelolaan IKI sesuai dengan Panduan Mutu IKI yang telah dibuat sendiri oleh Pengelola IKI serta melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perkarantinaan yang

berlaku. Oleh karena itu sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan Nomor 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan maka kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan pengelolaan IKI sebagaimana mestinya dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, Pembekuan Sertifikat dan Pencabutan Sertifikat.

Pengenaan sanksi ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman tetapi justru yang lebih utama adalah mendorong kesadaran Pelaku Usaha untuk menjalankan komitmen yang telah dibuatnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memberi manfaat bagi perkembangan usaha mereka dan sekaligus peran aktif mereka dalam membangun bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melalui usaha perikanan akan sejalan dengan azas untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam Indonesia.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif pada IKI adalah:

1. Tersedianya Petunjuk teknis Pengenaan Sanksi Administratif IKI bagi Tim Pusat dan Tim UPT KIPM dalam mengimplementasikan tata cara pengenaan sanksi administratif IKI; dan
2. Sebagai acuan bagi UPT KIPM dan Pusat dalam hal pengenaan sanksi, evaluasi, verifikasi dan pengaktifan kembali serta pengawasan sanksi bagi Pelaku Usaha.

BAB II
MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA
INSTALASI KARANTINA IKAN

A. Jenis Sanksi Administratif pada IKI meliputi:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembekuan Sertifikat IKI; atau
3. Pencabutan Sertifikat IKI.

B. Mekanisme Pemberian Sanksi

Dalam rangka memudahkan proses pengenaan sanksi, pengaktifan kembali, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap IKI maka pengenaan sanksi administratif IKI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Pelaku Usaha tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap rekomendasi perbaikan/temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi; dan
- b. Peringatan tertulis, dikenakan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

2. Pembekuan Sertifikat IKI

Pembekuan Sertifikat IKI diterbitkan oleh Kepala Badan KIPM dalam hal:

- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sampai jangka waktu peringatan tertulis berakhir; atau
- b. Berdasarkan hasil surveilan penyakit ikan ditemukan HPIK/HPI Tertentu;

Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan tersebut, dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

3. Pencabutan Sertifikat IKI

Pencabutan Sertifikat IKI diterbitkan oleh Kepala Badan KIPM, dalam hal:

- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sampai jangka waktu pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan berakhir;
- b. Hasil surveilan penyakit Ikan masih ditemukan HPIK/HPI Tertentu setelah jangka waktu pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan berakhir;
- c. Hasil inspeksi menyatakan CKIB tidak dilaksanakan;
- d. Penggunaan Instalasi Karantina tidak sesuai peruntukannya; dan/atau
- e. Memasukkan barang atau benda yang dilarang/ilegal kedalam Instalasi.

C. Tim Evaluasi

Tim Evaluasi dibentuk dalam rangka memberikan jaminan objektivitas, akuntabilitas penilaian, dan kepastian dalam proses pengenaan sanksi sehingga tidak merugikan bagi Pelaku Usaha selaku pihak pengelola IKI.

1. Tim UPT KIPM

Tim UPT KIPM dibentuk oleh Kepala UPT KIPM dengan anggota terdiri dari Inspektur Karantina dan PHPI yang merupakan Tim Sekretariat IKI. Tim ini bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap laporan hasil inspeksi IKI, melakukan verifikasi, menyusun laporan hasil penilaian kelayakan instalasi karantina, surveilan HPIK/HPI Tertentu, inspeksi CKIB dan pengenaan sanksi.

2. Tim Pusat

Tim Pusat dibentuk oleh Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan dengan anggota terdiri dari Inspektur Karantina dan PHPI yang melaksanakan pelayanan Sertifikasi IKI. Tim Pusat bertugas melakukan kegiatan analisis dan evaluasi laporan hasil penilaian kelayakan Instalasi Karantina, surveilan HPIK/HPI tertentu, inspeksi tertentu, pengenaan sanksi, pengaktifan kembali serta pengawasan sanksi.

Apabila dipandang perlu Inspektur Karantina Ikan di Pusat dapat melakukan verifikasi ke UPT KIPM atau IKI sebelum menyusun rekomendasi pengenaan sanksi atau pengaktifan kembali (pencabutan sanksi).

D. Tahapan Pengenaan Sanksi

1. Peringatan Tertulis

- a. Inspektur Karantina menyampaikan Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi kepada Tim UPT KIPM. Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi mengacu pada Pedoman Inspeksi CKIB di IKI;
- b. Inspektur Karantina yang melakukan inspeksi, selama masa perbaikan temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi melakukan evaluasi perbaikan; (Form 1)
- c. Apabila selama 7 (tujuh) hari kerja Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan terhadap Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi, maka inspektur karantina melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Tim UPT KIPM;
- d. Berdasarkan laporan evaluasi tersebut, Tim UPT KIPM melakukan koordinasi, menyusun Rekomendasi Pengenaan Sanksi dan menyusun Surat Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis;
- e. Tim UPT KIPM menyampaikan Rekomendasi Pengenaan Sanksi Tertulis (Form 2) dan menyusun Surat Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis serta menyampaikan kepada Kepala UPT KIPM untuk ditandatangani;
- f. Surat Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis, ditandatangani oleh kepala UPT KIPM atas nama Kepala Badan KIPM segera disampaikan kepada Pelaku Usaha, dengan tembusan kepada Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan (Form 3);
- g. Selama masa Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis yaitu 7 (tujuh) hari kerja, Tim UPT KIPM melakukan evaluasi/monitoring untuk mengetahui tindak lanjut pengenaan sanksi Peringatan Tertulis tersebut. (Form 7). Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah Pelaku Usaha telah melakukan tindakan perbaikan atau belum melakukan tindakan perbaikan;
- h. Dalam hal hasil evaluasi, Pelaku usaha telah melakukan perbaikan, namun tidak tuntas dalam waktu 7 hari kerja, maka maka Tim UPT KIPM Rekomendasi kepada Kepala UPT

KIPM untuk peningkatan sanksi menjadi Pembekuan Sertifikat IKI;

2. Pembekuan Sertifikat IKI

- a. Tim UPT KIPM berdasarkan:
 - 1) laporan evaluasi pengenaan sanksi IKI, yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha belum melakukan tindak lanjut/perbaikan temuan ketidaksesuaian sampai jangka waktu peringatan tertulis (Form 7); dan/atau
 - 2) laporan hasil surveilan yang menyatakan ditemukan positif HPIK/HPI Tertentu;
menyampaikan laporan Kepada Kepala UPT KIPM.
Format laporan hasil surveilan mengacu kepada petunjuk teknis surveilan atau laporan hasil uji laboratorium UPT KIPM;
- b. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala UPT KIPM memerintahkan Tim UPT KIPM menyusun surat usulan penerbitan Sanksi Pembekuan Sertifikat IKI kepada Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan (Form 4);
- c. Tim UPT KIPM menyusun surat usulan pengenaan sanksi IKI dan menyampaikan kepada Kepala UPT KIPM untuk ditandatangani;
- d. Setelah surat usulan sanksi Pembekuan Sertifikat IKI ditandatangani segera disampaikan kepada Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan;
- e. Berdasarkan usulan sanksi Pembekuan Sertifikat IKI, Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan memerintahkan Tim Pusat untuk melakukan evaluasi dan/atau verifikasi (Form 9);
- f. Tim Pusat melakukan evaluasi dan/atau verifikasi, menyusun Rekomendasi Pengenaan Sanksi (Form 10) dan menyusun Sanksi Pembekuan Sertifikat IKI, kemudian menyampaikan kepada Kepala Badan KIPM untuk ditandatangani;
- g. Sanksi Pembekuan Sertifikat IKI yang telah ditandatangani/diterbitkan, disampaikan kepada yang bersangkutan (Pelaku Usaha) melalui Kepala UPT KIPM

(Form 5);

- h. Selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Pengenaan Sanksi Pembekuan Sertifikat IKI, tim UPT KIPM melakukan evaluasi, terhadap:
 - 1) Pengenaan Sanksi Pembekuan Sertifikat IKI yang disebabkan Pelaku Usaha belum melakukan perbaikan/tindak lanjut temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi, evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah Pelaku Usaha telah melakukan tindakan perbaikan atau tidak melakukan tindakan perbaikan;
 - 2) Pengenaan Sanksi Pembekuan Sertifikat IKI yang disebabkan karena hasil surveilan ditemukan positif HPIK/HPI Tertentu, evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil surveilan penyakit ikan masih ditemukan (positif) atau sudah tidak ditemukan (negatif) HPIK/HPI Tertentu.
- i. Selama masa pengenaan sanksi Pembekuan Sertifikat IKI Pelaku Usaha melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) terhadap seluruh sistem CKIB sebagai tindak lanjut Hasil Surveilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebabnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai temuan/hasil penelusuran tersebut;
- j. Berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan telah tuntas diselesaikan, maka Kepala UPT KIPM menyusun usulan kepada Kepala Badan cq Kepala Pusat Karantina Ikan untuk Pengaktifan Kembali (Form 8); dan
- k. Kepala Pusat Karantina Ikan atas nama Kepala Badan KIPM menerbitkan surat Pengaktifan Kembali dan disampaikan kepada Pelaku Usaha (Form 11);
- l. Berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan belum tuntas diselesaikan sampai masa pembekuan berakhir, maka Kepala UPT KIPM menyampaikan usulan kepada Kepala Badan cq Kepala Pusat Karantina Ikan untuk peningkatan sanksi menjadi Pencabutan Sertifikat IKI. (Form 4).

3. Pencabutan Sertifikat IKI

- a. Tim UPT KIPM menyusun usulan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat IKI dan menyampaikan kepada Kepala UPT KIPM untuk ditandatangani berdasarkan laporan bahwa:
 - 1) Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sampai jangka waktu pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan berakhir;
 - 2) Hasil surveilan penyakit Ikan masih ditemukan HPIK/HPI Tertentu setelah jangka waktu pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan berakhir;
 - 3) Hasil inspeksi menyatakan CKIB tidak dilaksanakan; dan/atau
 - 4) Penggunaan Instalasi Karantina tidak sesuai peruntukannya.
- b. Selama dikenakan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina Ikan, Pelaku Usaha, dilarang:
 - 1) memindah tempatkan media pembawa/hasil perikanan dari Instalasi Karantina ke tempat lain tanpa persetujuan Petugas Karantina;
 - 2) memindah tangankan media pembawa/hasil perikanan kepada pihak lain; dan/atau
 - 3) menukar media pembawa/hasil perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.
- c. Surat usulan pengenaan sanksi Pencabutan Sertifikat IKI ditandatangani, segera disampaikan kepada Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan (Form 4);
- d. Berdasarkan surat usulan pengenaan sanksi Pencabutan Sertifikat IKI, Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan memerintahkan Tim Pusat untuk melakukan evaluasi dan/atau verifikasi;
- e. Tim Pusat melakukan evaluasi dan/atau verifikasi, menyusun rekomendasi dan menyusun sanksi Pencabutan Sertifikat IKI untuk disampaikan kepada Kepala Badan KIPM untuk ditandatangani;
- f. Kepala Badan menerbitkan Surat Pencabutan Sertifikat IKI (Form 6);

- g. Sanksi Pencabutan Sertifikat IKI yang telah ditandatangani/diterbitkan, disampaikan kepada yang Pelaku Usaha melalui Kepala UPT KIPM.

E. Pengawasan Pengenaan Sanksi

Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengenaan sanksi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait baik dalam proses maupun penerapan sanksi. Hal ini dilakukan juga untuk menghindari adanya ketidakpuasan atau komplain dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Pengawasan dilakukan oleh Puskaru melalui Tim Pusat. Pengawasan oleh Tim Pusat dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan peninjauan lapangan ke UPT KIPM maupun Instalasi Karantina Ikan atau secara on desk dengan melakukan komunikasi elektronik untuk memperoleh data-data yang diperlukan terkait pengenaan sanksi IKI.

Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian proses, pelaksanaan sanksi atau penyimpangan lainnya, Tim Pusat dapat merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah melakukan penyimpangan. Rekomendasi terhadap pengawasan pengenaan sanksi yang akan dikenakan dirumuskan bersama antara Tim Pusat dan Pejabat Pusat terkait. Sesuai rekomendasi tersebut Kepala Badan KIPM dapat menetapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang telah melakukan penyimpangan tersebut.

Selama dikenakan sanksi administratif, berlaku ketentuan:

1. Peringatan Tertulis Pelaku Usaha berhak mendapatkan pelayanan sertifikasi kesehatan sesuai dengan ketentuan Pelaku Usaha bersertifikat IKI, dan hasil surveilan tetap dapat berlaku 1 bulan bukan setiap shipment;
2. Selama dikenakan sanksi Pembekuan Sertifikat IKI dan sanksi Pencabutan Sertifikat, Pelaku Usaha tidak berhak mendapatkan pelayanan sebagaimana Pelaku Usaha yang bersertifikat IKI;
3. Pelaku Usaha yang akan melakukan lalu lintas media pembawa berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap melakukan kegiatan lalu lintas media pembawa (ekspor atau antar area) dilakukan analisis tindakan

karantina dan pemeriksaan laboratorium/pengujian sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- b. tidak mendapatkan percepatan pelayanan.
4. Pelaku Usaha yang menerima sanksi Pembekuan Sertifikat dan telah menerima Surat Pengaktifan Kembali, berhak mendapatkan pelayanan sebagai Pelaku Usaha yang bersertifikat IKI yaitu:
 - a. kemudahan/percepatan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan; dan
 - b. hasil surveilan kembali dapat berlaku 1 bulan.
 5. Pelaku Usaha yang diberikan sanksi Pencabutan Sertifikat IKI dapat mengajukan kembali untuk mendapatkan sertifikat IKI dengan mengajukannya sebagai instalasi baru, yaitu diproses sesuai permohonan baru dengan melengkapi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya UPT KIPM dapat melakukan proses sebagaimana mestinya dengan melakukan verifikasi permohonan, penilaian instalasi dan proses-proses lainnya.

BAB III
PENUTUP

Tata cara pengenaan sanksi administratif instalasi karantina ikan disusun sebagai acuan bagi Tim UPT KIPM maupun Tim Pusat dalam melakukan penerapan sanksi IKI. Dengan adanya tatacara pengenaan sanksi diharapkan seluruh pihak dapat menjalankan tugas dengan benar, transparan dan obyektif sehingga tidak menimbulkan adanya ketidakpuasan, komplain atau permasalahan lain yang timbul setelah sanksi IKI diterapkan.

Penerapan sanksi ini merupakan bagian dari pembinaan dan motivasi kepada para Pelaku Usaha atau pemilik, selaku pengelola IKI dalam upaya meningkatkan komitmen dan kepatuhan dalam menjalankan pengelolaan IKI. Penerapan sanksi diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kedisiplinan UPT KIPM dalam melakukan peran pembinaan di IKI, dengan demikian keberadaan IKI diharapkan mampu menjadi filter bagi masuk dan tersebarnya HPIK/HPI Tertentu, pendistribusian ikan/hasil perikanan secara ilegal atau pelanggaran hukum lainnya.

Diharapkan terhadap IKI yang telah melakukan pengelolaan sesuai ketentuan dan menerapkan CKIB berdasarkan prinsip-prinsip *biosecurity* dan ketertelusuran akan terwujud sistem jaminan kesehatan ikan, sehingga IKI mampu mengasihkan ikan dan hasil perikanan yang sehat, bermutu dan mampu bersaing dalam perdagangan global serta dapat diregistrasi ke negara tujuan bersyarat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.
RINA



Hari Maryadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PADA INSTALASI
KARANTINA IKAN

BENTUK DAN FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF
INSTALASI KARANTINA IKAN

Form 1. Laporan Evaluasi Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian Hasil
Inspeksi

LAPORAN
EVALUASI PERBAIKAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN HASIL INSPEKSI

Nomor:

Sesuai dengan Daftar Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi
Nomor..... telah dilakukan evaluasi oleh Tim UPT KIPM
atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Berdasarkan hasil evaluasi perbaikan temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi, disampaikan bahwa Instalasi Karantina Ikan(Nama dan Alamat IKI) TELAH/BELUM*) melakukan perbaikan sesuai Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi dengan bukti Berita Acara Hasil Verifikasi terlampir.

Demikian laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tgl, bulan , Tahun
Tim UPT KIPM

Ttd
(Nama.....)

Form 2 : Rekomendasi Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis

Kop Surat UPT KIPM

Nomor : Tanggal..... bulan.... Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas
Perihal : Rekomendasi Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis

Yth. Kepala UPT KIPM,

Menindaklanjuti Laporan Evaluasi Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi Nomor..... oleh Tim UPT KIPM atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Berdasarkan Laporan Evaluasi Perbaikan Temuan Hasil Inspeksi, kami merekomendasikan terhadap IKI(Nama dan Alamat IKI) diberikan Sanksi berupa PERINGATAN TERTULIS, karena sampai dengan batas waktu yang diberikan TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN PERBAIKAN sesuai Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tim UPT KIPM

Ttd

(Nama.....)

Form 3 : Bentuk dan Format Peringatan Tertulis

Kop Surat UPT KIPM

Nomor : Tanggal..... bulan....
Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas

Perihal : Peringatan Tertulis

Yth. Direktur/Pengelola,
(Nama Instalasi)

Berdasarkan Laporan Evaluasi Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi No..... oleh Tim UPT KIPM atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

.....

Maka terhadap IKI (Nama dan Alamat IKI), dikenakan Sanksi berupa PERINGATAN TERTULIS, karena sampai dengan batas waktu yang diberikan TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN PERBAIKAN sesuai Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi.

Sehubungan dengan pengenaan sanksi PERINGATAN TERTULIS maka terhadap IKI tersebut:

1. Selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat PERINGATAN TERTULIS berkewajiban untuk melakukan perbaikan sesuai Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi.
2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja kewajiban melakukan perbaikan tersebut tidak dilakukan, maka dapat ditingkatkan sanksinya menjadi PEMBEKUAN SERTIFIKAT IKI.

3. Selama masa pengenaan sanksi berupa PERINGATAN TERTULIS, kepada yang bersangkutan, tetap berhak mendapatkan pelayanan sertifikasi sebagai pengguna jasa yang telah bersertifikat IKI.
4. Selama masa pengenaan sanksi, pelaku usaha akan dilakukan evaluasi oleh Tim UPT KIPM untuk mengetahui tindak lanjut pengenaan sanksi. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a/n Kepala Badan,
Kepala UPT KIPM

ttd

(Nama.....)

Tembusan:

1. Kepala Badan cq Kepala Pusat Karantina Ikan,-
2. Arsip,-

Form 4 : Usulan Pengenaan Sanksi IKI

Kop Surat UPT KIPM

Nomor : Tanggal..... bulan.... Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas
Perihal : Usulan Pengenaan Sanksi IKI

Yth. Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan

Menindaklanjuti Laporan NO.....
oleh Tim UPT KIPM atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Instalasi Karantina tersebut, kami mengusulkan untuk dilakukan Pengenaan Sanksi berupa (disebutkan sanksinya) kepada (Nama dan Alamat IKI) karena:

1.
2.dst

Laporan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPT KIPM,

ttd

(Nama.....)

Form 5 : Bentuk dan Format Pembekuan Sertifikat IKI

Kop Surat BKIPM

Nomor : Tanggal..... bulan....
Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas
Perihal : Pembekuan sertifikat IKI

Yth. Direktur/Pengelola,
(Nama Instalasi)

Berdasarkan PERINGATAN TERTULIS/
.....Nomor.....
terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Nomor.....
atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Maka terhadap (Nama dan alamat IKI) diberikan Sanksi berupa PEMBEKUAN SERTIFIKAT IKI karena:

1.
2. dst

Sehubungan dengan pengenaan sanksi berupa PEMBEKUAN SERTIFIKAT IKI, maka terhadap IKI tersebut:

1. Selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat PEMBEKUAN SERTIFIKAT IKI, berkewajiban untuk melakukan perbaikan/tindak lanjut sesuai Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi Nomor...../ melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) terhadap seluruh sistem CKIB

- sebagai tindak lanjut Hasil Surveilan, yang ditemukan positif HPIK/HPI Tertentu*).
2. Apabila setelah 30 (tigapuluh) hari kerja kewajiban melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap Rekomendasi Perbaikan/Temuan Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi tersebut tidak dilakukan/ Hasil surveilan masih ditemukan positif HPIK/HPI Tertentu, maka dapat ditingkatkan sanksinya menjadi PENCABUTAN SERTIFIKAT IKI*).
 3. Selama masa pengenaan sanksi berupa PEMBEKUAN SERTIFIKAT IKI, kepada yang bersangkutan TIDAK BERHAK mendapatkan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan sebagai pengguna jasa bersertifikasi IKI. Pelayanan sertifikasi lalulintas media pembawa dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Setiap melakukan kegiatan lalu lintas media pembawa (ekspor atau antar area) dilakukan analisis tindakan karantina dan pemeriksaan laboratorium/pengujian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Tidak mendapatkan percepatan pelayanan.
 4. Selama masa pengenaan sanksi, pelaku usaha akan dilakukan evaluasi oleh Tim UPT KIPM untuk mengetahui tindak lanjut pengenaan sanksi. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

ttd

(Nama.....)

Keterangan *) coret salah satu

Tembusan:

1. Kepala Pusat Karantina Ikan,-
2. Kepala UPT KIPM,-
3. Arsip,-

Form 6 : Bentuk dan Format Pencabutan Sertifikat IKI

KOP BKIPM

Nomor : Tanggal..... bulan.....
Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas
Perihal : Pencabutan Sertifikat IKI

Yth. Direktur/Pengelola,
(Nama Instalasi)

Menindaklanjuti	Rekomendasi	Pengenaan	Sanksi
Nomor.....	terhadap	Usulan	Pengenaan
Nomor.....	atas:		Sanksi
1. Nama Perusahaan	:		
2. Alamat Kantor	:		
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan	:		
4. Pemilik	:		
5. Nomor SIKI	:		
6. Masa berlaku	:		
7. Jenis Media Pembawa	:		
8. Jenis Kegiatan	:		

Maka terhadap (Nama dan alamat IKI), diberikan Sanksi berupa PENCABUTAN SERTIFIKAT IKI dikarena:

1.
2.dst.

Sehubungan dengan penetapan PENCABUTAN SERTIFIKAT IKI ini maka:

1. Sejak pemberian sanksi berupa PENCABUTAN SERTIFIKAT IKI, kepada (Nama dan beralamat IKI) TIDAK BERHAK mendapatkan pelayanan sertifikasi sebagai pengguna jasa bersertifikasi IKI. Pelayanan sertifikasi lalulintas media pembawa dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. Setiap melakukan kegiatan lalu lintas media pembawa (ekspor atau antar area) dilakukan analisis tindakan karantina dan pemeriksaan laboratorium/pengujian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Tidak mendapatkan percepatan pelayanan;
2. Kepada Pengelola IKI tersebut dapat mengajukan permohonan sertifikat IKI kembali dengan mengajukan permohonan baru dengan persyaratan dan proses yang sama dengan perusahaan yang belum pernah tersertifikasi IKI.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

ttd

(Nama....)

Tembusan:

1. Kepala Pusat Karantina Ikan;
2. Kepala UPT KIPM;
3. Arsip.

Keterangan *) coret salah satu

Form 7 : Laporan Evaluasi Pengenaan Sanksi

LAPORAN
EVALUASI PENGENAAN SANKSI IKI

Sesuai dengan Surat Pengenaan Sanksi
Nomor.....tentang sanksi berupa (sebutkan
sanksinya...) telah dilakukan evaluasi oleh Tim UPT KIPM atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap..... (Nama dan Alamat IKI)
tersebut disampaikan bahwa :

- TELAH/BELUM*) melakukan perbaikan sesuai Surat Peringatan Tertulis/Pembekuan Sertifikat IKI*) Nomor dengan bukti sebagaimana terlampir; atau
- Hasil Suveilan DITEMUKAN/TIDAK DITEMUKAN*) HPIK/HPI Tertentu

Demikian laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tgl, bulan , Tahun
Tim UPT KIPM

ttd
(Nama.....)

Keterangan *) coret salah satu

Form 8 : Usulan Pengaktifan Kembali Sanksi IKI

Kop Surat UPT KIPM

Nomor : Tanggal..... bulan.... Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas
Perihal : Usulan Pengaktifan Kembali Sanksi IKI

Yth. Kepala Badan KIPM cq Kepala Pusat Karantina Ikan

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Pengenaan Sanksi IKI
sesuai Surat Pengenaan Sanksi Nomor.....oleh Tim UPT KIPM atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Kami mengusulkan terhadap (Nama dan Alamat IKI) tersebut
untuk dilakukan Pengaktifan Kembali Sertifikat IKI (mencabut sanksi) dari
sanksi berupa..... (sebutkan sanksinya) karena:

1.
2.dst

Laporan Hasil Evaluasi Pengenaan Sanksi IKI terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPT KIPM ,
ttd
(Nama)

Form 9 : Laporan evaluasi dan/atau verifikasi

Kop Surat PUSKARI

LAPORAN

EVALUASI DAN/ATAU VERIFIKASI PENGENAAN SANKSI

Nomor:.....

Sesuai Usulan Pengenaan Sanksi/Pengaktifan Kembali*)
Nomor..... telah dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi
atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau verifikasi terhadap Instalasi Karantina tersebut TELAH MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) kriteria untuk..... (sebutkan jenisnya: dikenakan sanksi/pengaktifan kembali) karena:

1.
2.dst

Demikian laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tgl, bulan, Tahun

Tim Pusat

ttd

(Nama.....)

Form 10 : Rekomendasi Pengenaan Sanksi/Pengaktifan Kembali*) IKI

Kop Surat PUSKARI

Nomor : Tanggal..... bulan.... Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas
Perihal : Rekomendasi Pengenaan Sanksi/Pengaktifan Kembali*)IKI

Yth. Kepala Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Menindaklanjuti Usulan Pengenaan Sanksi/ Pengaktifan Kembali

No..... terhadap laporan Nomoratas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Hasil evaluasi dan/atau verifikasi terhadap usulan tersebut dinyatakan bahwa:

1.
2.dst

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap (Nama dan Alamat IKI) direkomendasikan untuk (dikenakan sanksi berupa PEMBEKUAN SERTIFIKAT/PENGAKTIFAN KEMBALI SERTIFIKAT IKI *)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tim Pusat

ttd

(Nama.....)

Keterangan*) coret salah satu

Form 11 : Surat Pengaktifan Kembali Pembekuan Sertifikat IKI

Kop Surat BKIPM

Nomor : Tanggal..... bulan.... Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas
Perihal : Pengaktifan Kembali IKI

Yth. Direktur/Pengelola,
(Nama Instalasi)

Menindaklanjuti Rekomendasi Pengaktifan Kembali Sertifikat IKI
Nomor..... terhadap Sanksi Administratif
Nomor..... atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Maka terhadap (nama dan Alamat IKI) dinyatakan bahwa Sanksi berupa Pembekuan Sertifikat IKI sesuai Surat Pembekuan IKI Nomor..... dicabut dan nyatakan aktif kembali.

Sehubungan dengan penetapan Pengaktifan Kembali Sertifikat IKI ini maka kepada (Nama dan alamat IKI) BERHAK mendapatkan pelayanan sertifikasi sebagai pengguna jasa bersertifikat IKI yaitu:

1. Kemudahan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan; dan
2. Hasil Surveilans berlaku maksimal 1 bulan;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

ttd
(Nama)

Tembusan:

1. Kepala Pusat Karantina Ikan,-
2. Kepala UPT KIPM,-
3. Arsip,-

Form 12 : Laporan Pengawasan Pengenaan Sanksi IKI

LAPORAN

PENGAWASAN PENGENAAN SANKSI INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI)

Sesuai dengan Surat Pengenaan Sanksi Nomor.....
tentang sanksi berupa PERINGATAN TERTULIS/PEMBEKUAN SERTIFIKAT*)
atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap penerapan sanksi IKI
tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3) Dst

**) dengan bukti-bukti terlampir

Demikian laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pelaksana,

ttd

(Nama.....)

Keterangan*) coret salah satu

Form 13 : Rekomendasi Hasil Pengawasan Penerapan Sanksi

Kop Surat PUSKARI

Nomor : Tanggal..... bulan.... Tahun.....
Sifat : segera
Lampiran : berkas
Perihal : Rekomendasi Pengawasan Penerapan Sanksi

Yth. Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Sanksi

No..... terhadap penerapan sanksi Nomor atas:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan :
4. Pemilik :
5. Nomor SIKI :
6. Masa berlaku :
7. Jenis Media Pembawa :
8. Jenis Kegiatan :

Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau verifikasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan tersebut merekomendasikan agar:

- 1)
- 2)

*) disertai alasannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ttd

(Nama....)

Form 14 : Format Surat Perpanjangan Tindakan Perbaikan

Kop Surat UPT KIPM

Nomor : Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran :
Hal : Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi.

Yth. Pimpinan PT/CV/
Di

Sehubungan permohonan perpanjangan tindakan perbaikan yang Saudara ajukan dikarenakan masa waktu perbaikan temuan yang disepakati sampai dengan tanggal tidak dapat dipenuhi dan dengan ini kami memberikan perpanjangan waktu kepada Saudara untuk memperbaiki temuan dimaksud sampai dengan tanggal

Perlu kami sampaikan bahwa saudara diharuskan untuk segera melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian dalam masa waktu perpanjangan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala UPT KIPM,

NIP.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,

RINA



Hari Maryadi